

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan tentang sistem pendidikan inklusif telah menjadi kesepakatan internasional, seperti tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (1948), juga *Convention on The Rights of The Child* (1989) dan Deklarasi Bangkok (1991), tentang *Education For All* serta *Salamanca Statement* mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (1994). Hal yang terakhir ini bahkan merupakan tuntutan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, sehingga proses penyelenggaraan sistem pendidikan yang memisahkan individu dari komunitasnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak azazi manusia.

Para profesional pendidikan luar biasa (PLB) menilai bahwa penyelenggaraan sekolah dengan dua sistem (sekolah khusus dan sekolah reguler) bersifat diskriminatif bertentangan dengan nilai-nilai moral, dan hak-hak azazi manusia. Pada tataran operasional penyelenggaraan pendidikan dua system (sekolah khusus dan sekolah reguler) dipandang tidak efisien. Sementara pola pendidikan inklusif diyakini akan mampu menuntun ke arah tercapainya *universal primary education* (UPE), sebagaimana dilakukan di Amerika, Canada, Australia dan New Zeland, begitu pula di wilayah Asia, seperti Nepal, India, Srilanka , China, dsb. (Lynch, 1994).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Depdiknas, juga telah merintis model sekolah yang bermuansa humanistis yaitu "sekolah terpadu" dengan menerapkan konsep dasar dari Hellen Keller Internasional (HKI) yang juga bertindak sebagai sponsor utama. Namun kondisinya cukup memprihatinkan,

karena dari 184 lembaga yang telah dirintis, saat ini tinggal menampung 91 siswa berkebutuhan khusus (Dir. PLB, 2001). Balitbang Diknas juga telah mengadakan uji coba model pendidikan inklusif di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan mengadopsi konsep dasar sekolah terpadu dan di sempurnakan menggunakan pendekatan inklusif (Suroto, 2002). Namun dalam prakteknya sementara ini yang ditangani masih terfokus pada anak berkesulitan belajar saja, sehingga masih banyak aspek yang perlu disempurnakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang ideal.

Sementara hakekat pendidikan inklusif tidak sekedar membentangkan garis kontinum terhadap layanan pendidikan luar biasa dari sistem segregasi-integrasi-inklusi. Tetapi paradigma pendidikan inklusif menyentuh tataran nilai moral universal, kemanusiaan yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban bagi semua peserta didik, sehingga terwujud bangun pendidikan untuk semua (*education for all*) dalam semua jenjang dan setting pendidikan.

Penekanan dalam pendidikan inklusif terletak pada komitmen terhadap "*differentiates education for this diversity*" (Meijer, at.all, 1997, dalam Sunardi, 2002), sedangkan Sunardi (2002) lebih suka menggunakan istilah "sistem pendidikan yang responsif terhadap heterogenitas". Adanya pengakuan terhadap heterogenitas kebutuhan peserta didik pada hakekatnya mencerminkan bahwa secara kodrati semua peserta didik itu memiliki kebutuhan khusus. baik mereka yang pada saat ini terlayani dalam setting sekolah luar biasa (pendidikan khusus) maupun mereka yang terlayani dalam sekolah biasa (reguler). Artinya bahwa semua peserta didik ini memiliki kebutuhan khusus, namun ragam dan gradasinya tidak sama. Untuk itu walaupun pengembangan pendidikan inklusif itu harus dimulai dan berada pada sekolah reguler, tidak cukup sekedar menyertakan anak luar biasa (berkebutuhan khusus) pada sekolah reguler tersebut. Tetapi bangun

pendidikan inklusif tersebut haruslah secara alami mampu mengejawantahkan nilai-nilai moral universal yang holistik sesuai dengan kebutuhan khusus seluruh peserta didiknya.

Pada sisi lain pengakuan kodrati secara alami peserta didik mencerminkan adanya pengakuan peran nilai-nilai budaya setempat dalam konteks pengembangan pendidikan inklusif. Argumentasi ini sejalan dengan konsep pendidikan yang telah menjadi simbol budaya pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara (dalam Ratnaningsih, 2000), sebagai berikut: "Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya"

Pernyataan tersebut mengisyaratkan urgensi aspek budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagaimana dinyatakan Watterdal, (2002) bahwa dimensi muatan lokal setempat sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di Indonesia.

Untuk itu ditemukannya rumusan sistem pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal yang sesuai dengan kebutuhan anak, merupakan alternatif logis dan menjadi berposisi strategis dalam upaya penerapan sistem pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Masalah Penelitian dan Definisi Operasional

1. Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sejalan dengan makin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap isu-isu moral, persamaan hak-hak anak dalam pendidikan, demokratisasi dalam pendidikan, dan peningkatan kualitas Pendidikan, maka isu pendidikan inklusif pada saat ini telah menjadi komitmen nasional dan prioritas pemerintah. Pada sisi lain karena pendidikan inklusif ini merupakan isu baru dalam dunia pendidikan, secara konseptual

masalah utamanya masih berada pada tataran makro, yaitu bagaimana konsep model pendidikan inklusif dan implementasinya yang dipandang responsif terhadap heterogenitas kebutuhan khusus anak, alami dan selaras dengan tatanan budaya pendidikan lokal.

Sejalan dengan komitmen tersebut di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana rumusan model pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan local tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya.

Secara spesifik masalah penelitian ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

- a. Bagaimana konsep model dan implementasi system pendidikan inklusif yang di uji-cobakan oleh Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Daerah Istimewa Jogjakarta?
- b. Bagaimana rumusan konseptual pendidikan inklusif yang telah mendapat pengakuan internasional dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah?
- c. Bagaimana rumusan budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya?
- d. Bagaimana rumusan interrelasi antara konsep model dan implementasi pendidikan inklusif yang dilakukan Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Daerah Istimewa Jogjakarta, Konseptual pendidikan inklusif, dan budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya?

2. Definisi Operasional

- a. Pendidikan inklusif adalah "sistem pendidikan yang responsif terhadap heterogenitas kebutuhan peserta didik" (Sunardi, 2002).
- b. Sekolah Inklusif adalah model sekolah yang mampu menyediakan program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik "normal" maupun "berkebutuhan khusus" dalam satu lembaga yang sama, sehingga potensi peserta didik tersebut dapat berkembang secara optimal.
- c. Sekolah reguler adalah model sekolah tradisional segregatif yang secara eksklusif hanya menampung dan menyediakan program pendidikan bagi peserta didik yang diklasifikasikan "normal".
- d. Sekolah khusus adalah model sekolah tradisional segregatif yang secara eksklusif hanya menampung/menyediakan program pendidikan bagi peserta didik yang diklasifikasikan "luar biasa" atau "berkebutuhan khusus".
- e. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus adalah semua anak yang mengalami gangguan fisik, mental atau emosi atau kombinasi dari gangguan-gangguan tersebut sehingga mereka membutuhkan pendidikan secara khusus, dengan guru dan sistem lembaga yang khusus baik secara permanen maupun secara temporal (Lynch, 1994).
- f. Kurikulum sekolah adalah isi program kemampuan dasar dan program kemampuan khusus pada program kegiatan belajar (Kep. Mendiknas. No 0491/U/1992).
- g. Budaya atau kebudayaan (*culture*) meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang terpola dalam suatu

masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. atau dalam rumusan yang lebih umum adalah "cara kita hidup seperti ini", *the way we are* (Prosser, dalam-Supriadi, 2001).

- h. Budaya lokal diartikan sebagai wujud tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya yang berlaku pada wilayah tertentu. dalam hal ini adalah Surabaya.
- i. Budaya pendidikan lokal adalah serangkaian tindak para pelaku pendidikan, berupa kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang terpola dalam suatu setting pendidikan dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya yang berlaku pada wilayah tertentu, dalam hal ini adalah Surabaya.

C. Premis-Premis Penelitian

1. Konsep model sistem pendidikan inklusif datang dari Negara Barat yang egaliter, dimana dimensi kesenjangan antar kelompok relatif tidak tajam serta telah memiliki kesadaran hukum dan dasar demokratisasi yang relatif mapan.
2. Konsep model pendidikan di Indonesia tumbuh dan berkembang berlandaskan semangat kebangsaan sesuai dengan karakteristik bangsa yang heterogen dan multi etnik.

3. Nilai-nilai budaya pendidikan lokal secara alami memiliki kekuatan seleksi dan adaptasi terhadap semua konsep model kependidikan yang datang dari luar.
4. Sistem pendidikan reguler yang tradisional dan eksklusif, dipandang sangat diskriminatif tidak sesuai dengan etika moral hak azazi manusia serta konsep pendidikan untuk semua.
5. Sistem pendidikan khusus yang tradisional dan eksklusif, dipandang cukup mahal dan tidak mampu mengembangkan potensi semua anak sesuai dengan berkebutuhan khususnya, agar nantinya dapat hidup layak dan wajar di tengah-tengah masyarakat yang hiterogen.
6. Sebagian besar anak dengan kebutuhan khusus dapat di didik di sekolah reguler dengan sedikit memodifikasi pada sistem pendidikan yang telah ada.

D. Tujuan Penelitian

Sasaran utama penelitian adalah ditemukannya rumusan model hipotetik pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya, beserta kerangka aksinya.

Secara khusus tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh hasil evaluasi uji-coba sistem pendidikan inklusif yang dilakukan oleh Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Wonosari Jogjakarta,
2. Menemukan rumusan konseptual pendidikan inklusif melalui kajian kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,
3. Menemukan rumusan budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya melalui pendekatan kualitatif,



Menemukan rumusan interrelasi antara model uji-coba pendidikan inklusif yang dilakukan Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan konseptual pendidikan inklusif, dan budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya,

E. Keutamaan Penelitian

Penelitian ini secara konseptual dalam beberapa aspek memiliki keutamaan sebagai berikut:

1. Topik penelitian diangkat dari masalah aktual yang sedang menjadi isu Nasional maupun Internasional, sehingga hasil penelitian yang diperoleh secara langsung akan dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan isu penyelenggaraan pendidikan inklusif,
2. Temuan utama penelitian berupa model pendidikan inklusif yang dibangun berdasarkan budaya pendidikan lokal, dipandang sebagai salah satu model yang tingkat keberterimaannya dalam masyarakat dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,
3. Temuan pendukung berupa kerangka aksi model ini, secara langsung bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam mensukseskan program pendidikan nasional yang berkaitan dengan komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif, maupun dalam konteks mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar,
4. Temuan penelitian berupa elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang digali dari dokumen-dokumen dan literasi yang

relevan, dapat menjawab keraguan terhadap eksistensi pendidikan inklusif secara konseptual,

5. Temuan penelitian berupa elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip budaya pendidikan lokal, mampu menyajikan potret budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar, disamping untuk keperluan penelitian ini, juga dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan di sekolah dasar.
6. Temuan berupa elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar ini, merupakan temuan baru dalam pendidikan khusus maupun pendidikan pada umumnya. Temuan tersebut dikembangkan dari hasil analisis interrelasi dan relevansi antara elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dengan elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip budaya pendidikan lokal.

